

Daftar Pustaka

- Alfando W.S, J. (2013). Peranan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dalam Mewujudkan Desa Mandiri di Desa Sidomulyo Kec. Anggana Kutai Kartanegara. *eJournal Ilmu Komunikasi*, 1(2), 109–125.
- Andrianto, N. (2007). *Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Bayumedia Publishing.
- Aryani, N. P. D. E., Werastuti, D. D. N. S., & Adiputra, I. M. P. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa, Efektivitas Kinerja Pendamping Lokal Desa dan Keterlibatan Masyarakat Terhadap Pengoptimalan Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 11(2), 178–190. <https://doi.org/10.35591/wahana.v23i2.231>
- Ati Nafsil, S. M. (2013). Kebutuhan Informasi Masyarakat Desa Hutan Kabupaten Pekalongan. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 2(Vol 2, No 4 (2013): Oktober 2013), 38–51.
- Clarkson, M. B. E. (1995). A Stakeholder Framework For Analyzing And Evaluating Corporate Social Performance. *Academic of Management Review*, 20(1), 92–117.
- Fajar, M. (2009). *Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktik*. Graha Ilmu.
- Fitrinanda, D., Linda, & Febrianty L, M. (2020). Pengaruh Kompetensi Desa, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Journal Of Islamic Accounting Research*, 2(2), 92–112.
- Freeman, R. E. (1984). *Stategic Management: A Stakeholder Approach*. Fitman.
- Ghozali, I. (2009). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19* (6 ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Multivariate dengan Program IBM SPSS 19* (5 ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Grahani F, A., & Kurniawan, R. (2017). Implementasi Keterbukaan Informasi Publik dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *RES PUBLICA*, 1(3), 41–56.
- Handayani, Y. (2021). Peran BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat pada Proses Pelaksanaan Pembangunan. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(1), 478–485.
- Heller, K., Price, R. H., Reinharz, S., Riger, S., & Wandersman, A. (1984). *Psychology and Community Change: Challenges of the Future* (2 ed.). Dorsey.
- Hukum, J. D. dan I. (2020). *Undang - Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2020*. Sekretariat Kabinet Republik Indoensia. https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176114/UU_Nomor_2_Tahun_2020.pdf
- Kementerian, D. (2020). *Peraturan Menteri Desa (Permendes) No 7 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020*. JDIH BPK RI.
- Kementerian, D. N. (2014). *Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. JDIH BPK RI. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/111736/permendagri-no-113-tahun-2014>

- Kementerian, D. N. (2020). *Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah*. JDIH BPK RI.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/141351/permendagri-no-20-tahun-2020>
- Kementerian, Keuangan. (2020). *Daftar Alokasi TKDD 2020 Prov. Bali*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?page_id=17827
- Kementerian, Komunikasi. (2008). *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*. JDIH Kominfo.
https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/172/t/undangundang+nomor+14+tahun++2008+tanggal+30+april+2008
- Lidyana, V. (2020). *Geger di Akhir Tahun, Korupsi Bansos Corona Terkuak*. Detik Finance. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5316714/geger-di-akhir-tahun-korupsi-bansos-corona-terkuak/1>
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit ANDI.
- Maulana, R. (2020). *Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kecenderungan Pegawai Melakukan Kecurangan pada Sektor Pemerintahan Desa di Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur*. Universitas Islam Indonesia.
- Notoatmodjo, S. (2005). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. PT. Rineka Cipta.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa*. Erlangga.
- Nurhakiki, A. (2016). Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menampung Aspirasi Masyarakat (Studi Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran). In *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung*.
- Nurudin. (2004). *Sistem Komunikasi Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.
- Pemerintah, P. (2014a). *Peraturan Pemerintah (PP) tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. JDIH BPK RI.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5501>
- Pemerintah, P. (2014b). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. JDIH BPK RI.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>
- Pundenswari, P. (2017). Analisa Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik bidang Kesehatan terhadap Kepuasan Masyarakat. *Jurnal Publik*, 11(1), 13–21.
- Puspitasari, N. L. P., & Bendesa, I. K. G. (2016). Analisis Kualitas Pelayanan Publik di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Badung. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 5(1), 89–114.
- Rastana, D. (2021). *Dana Desa yang Diterima Gianyar Tahun ini Naik*. Bali Express. <https://baliexpress.jawapos.com/read/2021/02/04/239573/dana-desaya-yang-diterima-gianyar-tahun-ini-naik>
- Reza, E. M. (2018). *Transparansi Penggunaan Dana Desa di Kepenghuluan Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Rosidin, I. (2020). *Kepala Dinas Pariwisata Buleleng Diduga Jadi Dalang Kasus Korupsi Dana Hibah PEN*. Regional Kompas.
<https://regional.kompas.com/read/2021/02/22/17193571/kepala-dinas-pariwisata-buleleng-diduga-jadi-dalang-kasus-korupsi-dana-hibah?page=all>

- Santosa, M. A. (2001). *Good Governance dan Hukum Lingkungan*. Indonesian Center for Environmental Law (ICEL).
- Saputra, K. A. K., Sujana, E., & Tama, G. M. (2018). Perspektif Budaya Lokal Tri Hita Karana Dalam Pencegahan Kecurangan Pada Pengelolaan Dana Desa. *Researchgate.net*, 1(1), 28–41.
- Sekaran, U. (2006). *Research Methods for Business*. Salemba Empat.
- Sekaran, U. (2007). *Research Methods for Business* (4 ed.). Salemba Empat.
- Setiyanningrum, I. (2017). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran dengan Konsep Value for Money pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Yogyakarta. In *Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sugiyono. (2007a). *Metode Penelitian Administrasi*. CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2007b). *Statistika untuk Penelitian*. CV. Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Pustaka Baru Press.
- Trihendradi, C. (2008). *Statistik Six Sigma dengan Minitab*. Andi.
- Ultafiah, W. (2017). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Mewujudkan Good Governance pada Desa di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat. In *Universitas Muhammadiyah Palembang*.
- Widiartana, N. K., & Darmawan, N. A. S. (2020). Good Governance di Desa Adat Banjar: Transparansi Dana Krama Tamiu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi ...*, 10(3), 307–315.
- Yusran, A., Sadik, N., & Hasrullah. (2015). Hubungan antara Implementasi Keterbukaan Informasi Publik dengan Peningkatan Penerbitan Perizinan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang. *Jurnal Komunikasi*, 4(3), 315–327.
- Zuhriansyah, M. (2013). Penyerapan Aspirasi Masyarakat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal*, II(2), 311–319.